

**PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU KELUARGA
MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR**

Bimantara Nugraha Hadi Putra
NPP. 30.0785

*Asal Pendaftaran Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email : bimantara.n.tara@gmail.com

ABSTRACT

Problems/ Background (GAP): The author focuses on the implementation of issuing family cards through the population administration information system (SIAK) at the Ponorogo Regency Population and Civil Registration Office. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the Implementation of Issuing Family Cards through the Population Administration Information System (SIAK) at the Ponorogo Regency Population and Civil Registration Service. **Methods:** This study used a qualitative descriptive with an inductive approach based on Subagyo's theory (2006) with observational data collection techniques, in-depth interviews (28 informants) and documentation including data regarding the Population Administration Information System at the Population and Civil Registration Office of Ponorogo Regency. **Results/Findings:** The results of this study concluded that the issuance of family cards is faster and more efficient because the data that is integrated in the system can be processed easily and accurately, solving problems that occur in Disdukcapil, Ponorogo Regency can be resolved immediately so that new problems do not arise, and the implementation Issuance of family cards through the population administration information system at Disdukcapil, Ponorogo Regency, has gone well because it complies with existing SOPs. In the implementation of the productivity improvement program, there are several factors inhibiting the security of technological devices which are still frequently disrupted, the presence of invalid population data, and social and cultural conditions that are less active. **Conclusion:** Based on the findings and analysis in this study, it is recommended that the Ponorogo Disdukcapil carry out network repairs in the Ponorogo Regency Disdukcapil, carry out ball-picking techniques for the community, and conduct a re-data collection

Keywords: Population Administration Information System, issuance of Family Cards, Disdukcapil Ponorogo

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada pelaksanaan penerbitan kartu keluarga melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. **Metode :** Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan teori Subagyo (2006) dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam (28 informan) dan dokumentasi meliputi data-data mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerbitan kartu keluarga menjadi lebih cepat dan efisien karena data yang terintegrasi dalam sistem dapat diproses dengan mudah dan akurat, penyelesaian masalah yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Ponorogo dapat segera terselesaikan sehingga tidak timbul permasalahan yang baru, dan pelaksanaan penerbitan kartu keluarga melalui sistem informasi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan SOP yang ada. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas terdapat beberapa faktor penghambat keamanan perangkat teknologi yang masih sering mengalami gangguan, adanya data penduduk yang tidak valid, dan keadaan sosial budaya yang kurang aktif. **Kesimpulan :** Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, direkomendasikan agar Disdukcapil Ponorogo melakukan perbaikan jaringan di Disdukcapil Kabupaten Ponorogo, melakukan teknik jemput bola terhadap masyarakat, dan melakukan pendataan ulang

Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga, Disdukcapil Ponorogo

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki 17.504 pulau dan 5 (lima) pulau terbesar yang terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat nasional dan lokal dapat dilakukan dengan data tentang kependudukan yang akurat untuk membuat pemetaan yang tepat dalam pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk. Tertibnya administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini sudah menjadi kebutuhan. Bentuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan SIAK merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat Kabupaten/Kota. SIAK juga dapat menyajikan data dan

informasi yang mutakhir bagi lembaga dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 152 ayat (3) menyatakan : "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Output dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu berupa dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengesahan anak, dll), keterangan kependudukan dan kartu keluarga.

Kartu Keluarga menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kejelasan status dalam kekuatan hukum tetap dan kedudukan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (Soemartono, 2011). Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) harus memiliki Kartu Keluarga sebagai identitas awal yang wajib dalam dokumen karena sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kejelasan status dalam kekuatan hukum kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 13 ayat (1) sampai (4) menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK sebagaimana yang dimaksud pada yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan dari Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pelayanan administrasi kependudukan secara online masih menemui beberapa hambatan. Apabila dilihat dari data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat yang memiliki kartu keluarga belum secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti jaringan yang tersedia di kantor kependudukan dan pencatatan sipil masih terbatas. Apalagi pada saat ini kepengurusan dokumen kependudukan secara online juga masih belum dipahami dan dimengerti oleh masyarakat banyak. Mutu pelayanan publik yang diberikan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi di Kabupaten Ponorogo. Fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah harus inovatif dan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik dengan sesuatu yang dianggap baru dan menarik. Dengan pelayanan yang inovatif dan sesuai kebutuhan, pelaksanaan tertib administrasi di masyarakat dengan sendirinya juga akan meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian oleh Dinavia Riedzki Adzani dengan judul Kualitas pelayanan anjungan dukcapil mandiri (ADM) di dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Hasil Penelitian menunjukkan bahwa inovasi dan kualitas pelayanan dalam memberikan pelayanan dukcapil mempengaruhi kepuasan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan (SIAK) dalam tertib administrasi, sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada kualitas pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Selanjutnya Penelitian Wisber Wirnanto dengan judul Replikasi model inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Replikasi model inovasi pelayanan adminduk yang terbaik dilakukan berdasarkan adanya kebijakan upaya peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan adanya kebutuhan replikasi inovasi pelayanan. Pada penelitian ini Peneliti berfokus pada pelaksanaan Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan (SIAK) dalam tertib administrasi sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada model inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kesamaan dari kedua penelitian tersebut adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Pernyataan kebaruan ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu peneliti disini berfokus pada penerbitan kartu keluarga melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif serta lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Kabupaten Ponorogo dengan teori yang digunakan dari Koonz dan O'Donnel (2021) yang menyatakan bahwa indikator pelaksanaan ada 3 yaitu perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), dan Pelaksanaan (*executing*).

1.4. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana peneliti menganalisa secara langsung dilapangan mengenai pelaksanaan penerbitan kartu keluarga melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Peneliti mengumpulkan data dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data observasi, peneliti melakukan observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Kemudian peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 28 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Petugas Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, Camat Ngebel serta Masyarakat yang pernah atau sedang pernah mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Serta

pengumpulan data dokumentasi dengan memperoleh berbagai data yang mampu mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun analisisnya menggunakan teori yang digagas oleh Koonz dan O'Donnel (2021) yang menyatakan bahwa indikator pelaksanaan ada 3 yaitu perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), dan Pelaksanaan (*executing*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan penerbitan kartu keluarga melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur melalui teori Koonz dan O'Donnel (2021) dapat diketahui jika faktor kesuksesan dari sebuah pelaksanaan program dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), dan Pelaksanaan (*Executing*). Adapun pembahasan dapat dilihat dari subbab berikut :

3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang sudah tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik diawali dengan adanya tujuan, sasaran atau visi misi yang jelas. Pengetahuan terhadap tujuan, sasaran atau visi misi organisasi adalah hal mutlak yang seharusnya pegawai bukan hanya mengetahui namun juga pahami.

Pada dimensi perencanaan lingkungan dinas Dukcapil kabupaten Ponorogo juga memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan perencanaan. Sarana prasarana yang tersedia di Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo juga sudah memiliki program aplikasi (software) yang berstandar nasional, database yang dapat mengelola data dengan jumlah tinggi secara cepat, bangunan gedung untuk pelaksanaan pengelolaan database berbasis SIAK, perangkat printer, perangkat komputer yang berkemampuan tinggi, internet, dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara online.

Tabel 1.
Perangkat SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

No. (1)	Perangkat (2)	Kegunaan (3)	Jumlah (4)
A. Perangkat Keras			
1	Server AFIS (Sidik Jari) UPS 1000 VA	-Aplikasi untuk AFIS -Database untuk sidik jari Backup	6 Buah
2	Dekstop PC	daya listrik server -Komputer untuk menjalankan aplikasi AFIS -Terkoneksi Server AFIS -Untuk Pengelolaan KK	4 Buah
3	Iris Scanner	Merekam iris mata	22 Buah
4	Fingerprint Scanner	Merekam sidik jari yang terpasang di	6 Buah
5	Switch and Cabling	dekstop PC	6 Buah

6	Hardisk Eksternal	Tempat Penyimpanan Data	3 Buah
7	Kamera Digital	Mengambil foto penduduk papan	5 Buah
8	Signature Pad	elektronik untuk menulis tanda	12 Buah
9		tangan	6 Buah
10	Tripod	Meletakkan kamera digital agar tidak goyah	12 Buah
B. Perangkat Lunak			
1	Operating System (OS), windows server	-	3 Buah
2	Aplikasi AFIS Sistem	-	3 Buah
3	Antivirus Server	-	3 Buah

Sumber : diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat, kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sudah cukup representative. Penulis dapat menarik kesimpulan dalam pelaksanaan SIAK dalam pelayanan pembuatan KK di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah representatif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pada indikator strategi, kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan pembuatan KK di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyaluran atau transmisi yang baik dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di setiap kecamatan sampai ke kelurahan/desa.

3.2 Pengorganisasian (*organizing*)

Sebagai sebuah organisasi, pembagian tugas merupakan modal yang sangat penting yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Pembagian tugas ini mempunyai dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan yang diputuskan berdasarkan politik. Pembagian tugas yang dimiliki harus bersifat formal dan memiliki legitimasi yang jelas agar tugas dan wewenang dapat dijalankan dengan baik. Bukti bahwa pengorganisasian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sangatlah bagus mulai dari bawah hingga ke jenjang pimpinan tertinggi sehingga tidak adanya tumpang tindih wewenang antara pegawai satu dengan yang lain.

Menurut data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo per Desember 2023, jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo berjumlah 87 orang yaitu 32 orang PNS dan 38 orang Non PNS. Dari data tersebut ditinjau dari jenis kelamin, pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Dari data tersebut ditinjau dari jenis kelamin, pangkat/golongan dan usianya adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan jenis kelamin, dari 70 orang pegawai, 41 orangnya adalah laki-laki dan 29 orang lainnya adalah perempuan. Komposisi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki adalah 71% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 29%. 2. Berdasarkan golongan kepangkatan, dari 70 pegawai sebanyak 32 orang yang tergolong PNS, sehingga sebagian besar dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sudah berstatus PNS.

Tabel 2.
Data Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo Menurut Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV-C	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV-B	1 orang
3	Pembina	IV-A	2 orang
4	Penata Tingkat I	III-D	6 orang
5	Penata	III-C	3 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III-B	2 orang
7	Pengatur Tingkat I	II-D	5 orang
8	Pengatur	II-C	12 orang
JUMLAH			32 orang

Sumber : Database dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ponorogo sudah memadai sehingga dalam Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ponorogo dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3.3 Pelaksanaan (*executing*)

Pelaksanaan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat, dimana pelaksanaan ini merupakan sebuah fase yang mendeskripsikan bahwa kebijakan tersebut telah dirumuskan dan dirancang hingga mencapai kata mufakat yang akan diterapkan pada lokasi sasaran karena adanya masalah dari suatu tempat yang menyebabkan perlu dilakukannya penyelesaian masalah.

Penulis memilih menggunakan teori pelaksanaan Koonz dan O'Donnel (2021) untuk melakukan analisis bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan teori pelaksanaan yang penulis gunakan yaitu teori Koonz dan O'Donnel dapat diketahui jika faktor kesuksesan dari sebuah pelaksanaan program dipengaruhi oleh empat faktor yaitu pengembangan prosedur, penentuan prioritas, koordinasi, dan motivasi karyawan.

Dalam indikator pemanfaatan berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, dari 70 orang pegawai, 41 orangnya adalah laki-laki dan 29 orang lainnya adalah perempuan. Komposisi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki adalah 71% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 29%. Menurut Tabel 2. mengenai data pegawai dispendukcapil Kabupaten Ponorogo menurut pangkat dan golongan ditemukan bahwa terdapat 32 orang pegawai yang memiliki pangkat golongan

Hasil utama dalam penertiban ini yakni membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam membantu menyukseskan pelaksanaan SIAK dalam pelayanan pembuatan KK

Hasil utama penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa narasumber sehingga ditemukan bahwa dapat dilihat bagaimana kesungguhan pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Ponorogo permasalahan yang dihadapi mengenai pelaksanaan SIAK dalam pelayanan pembuatan KK guna pencapaian target yaitu database kependudukan yang valid dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pelaksanaan pendataan penduduk dengan teknik jemput bola, perbaikan jaringan komunikasi serta melengkapi infrastruktur merupakan langkah yang diambil untuk menangani permasalahan yang muncul. Hal ini juga bertujuan agar target yang telah ditentukan dari aplikasi program SIAK ini dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban kartu keluarga melalui sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh baiknya fasilitas atau sarana prasarana penunjang kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sehingga proses kepengurusan dapat berjalan dengan cepat. Layaknya program lainnya, pelaksanaan penertiban ini juga memiliki beberapa hambatan seperti keamanan perangkat teknologi dan penataan arsip dokumen yang kurang terjamin dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. Dari permasalahan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur selalu melakukan upaya guna mengevaluasi hambatan yang terjadi serta untuk meminimalisir hambatan yang akan terjadi di kemudian hari dengan cara melakukan perbaikan jaringan komunikasi internet serta menyinkronkan setiap database penduduk yang ada di server kabupaten maupun di server pusat, melakukan teknik jemput bola untuk masyarakat yang berada di desa pedalaman dan melakukan sosialisasi secara terus menerus secara berkesinambungan, Disdukcapil Kabupaten Ponorogo juga melakukan pendataan ulang terhadap setiap penduduk yang data penduduknya belum valid.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan penertiban kartu keluarga di yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan SIAK sudah cukup baik, karena fasilitas atau sarana prasarana sudah cukup baik dan pengurusan pembuatan kartu keluarga (KK) juga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, 2. Hambatan yang ditemukan mengenai pelaksanaan SIAK dalam pembuatan kartu keluarga di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, antara lain mengenai keamanan perangkat teknologi yang digunakan dan penataan arsip dokumen kependudukan kurang terjamin dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan, masih adanya data penduduk yang belum valid di beberapa tempat di Kabupaten Ponorogo, dan keadaan sosial budaya masyarakat yang kurang aktif untuk mengetahui akan pentingnya dokumen kependudukan, 3. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan SIAK dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga antara lain melakukan perbaikan jaringan komunikasi internet serta menyinkronkan setiap database penduduk yang ada di server kabupaten maupun di server pusat, melakukan teknik jemput bola

untuk masyarakat yang berada di desa pedalaman dan melakukan sosialisasi secara terus menerus secara berkesinambungan, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo juga melakukan pendataan ulang terhadap setiap penduduk yang data penduduknya belum valid.

Keterbatasan Penelitian . Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta penelitian ini tidak dapat memperoleh data observasi secara langsung program pelatihan tenaga kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, Dinavia Riedzki (2018). Kualitas pelayanan anjungan dukcapil mandiri (ADM) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Banten.
- Koonz, H. & C. O'Donnell. & H. W. (2021). *Manajemen*.
- Soemartono dan Hendraastuti. (2011). *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Mandiri Provesi.
- Subagyo. (2006). Ubi Kayu Substitusi Tepung-Tepungan. *Food Review*, 1, 18–22.
- Wirnanto, Wisber (2018). Replikasi model inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 13 ayat (1) sampai (4) tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 152 ayat (3) tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia